



Antara Otoritarianisme dan Demokrasi

**Memahami dan
menerapkan kosa
kata dasar politik**

oleh Corrie van der Ven

Pengantar

"Gereja perlu pemahaman yang sehat tentang politik", kata Pak John Campbell-Nelson pada akhir kuliah umum, semester yang lalu. "Politik pada dasarnya mengenai *bagaimana kita bisa hidup bersama*. Apakah hal itu baik atau tidak?"

Pengalaman saya adalah bahwa sebagian mahasiswa STT-Intim memang menganggap politik sebagai sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kotor. Ada juga yang mengabaikan politik, karena politik dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan bagi orang Kristen. Pada waktu yang sama saya pernah melihat satu gedung gereja yang dihias dengan warna kuning. Gereja itu tidak enggan untuk mengidentifikasi diri dengan partai politik (yang nota bene disebut oleh si orator Wisuda STT-Intim 2003 partai yang bersifat *neo fasis* selama Orde Baru¹). Dengan kata lain, ada baiknya untuk membahas politik dan ke(tidak)terlibatan kita dalam politik. Dalam sumbangan ini saya mulai dengan menyinggung beberapa istilah: politik, otoritarianisme, demokrasi, kaum cendekiawan. Setelah itu saya menulis sedikit tentang STT-Intim, sebagai penerapan istilah-istilah itu.

Mengenai politik

Kata politik berasal dari kata Yunani *polis*, yang berarti 'negara-kota'. *Polis*, menurut Hannah Arendt², adalah tempat di mana segala sesuatu diselesaikan lewat kata dan persuasi, bukan lewat paksaan dan kekerasan. Jadi, *polis* adalah dunia politik yang beradab. Ini pendekatan yang optimis. Ada juga pendekatan terhadap politik yang lebih dipengaruhi oleh pesimisme Machiavelli dan Hobbes³ yang berpendapat bahwa kesenjangan antara moral dan politik susah dijembatani. Politik penuh dengan egoisme, nepotisme, korupsi, ambisi, kerakusan, dsb. *Power corrupts!*

Walaupun konsep politik sudah dibahas sejak Plato dan Aristoteles, jadi sudah hampir 2500 tahun, namun belum ada kesepakatan tentang istilah itu. Untuk sementara kita berpegang pada definisi Pak John yang tadi: politik membahas bagaimana kita bisa hidup bersama. Politik termasuk diskusi mengenai pembagian pajak kita (pajak dipakai untuk pendidikan, gedung-gedung pemerintah atau uang suap?) atau persepuluhan kita (untuk beasiswa mahasiswa teologi, pemberdayaan orang lemah atau gedung gereja?): hal-hal yang penting bagi kita semua.

Politik tidak dibatasi pada lembaga politik yang resmi. Pemerintahan (negara, gereja, sekolah) tetapi juga usaha untuk mempengaruhi pemerintahan termasuk politik. Hal ini juga ditampilkan oleh ahli politikologi yang biasanya membedakan antara *polity*, *politics* dan *policy*⁴.

Polity berarti susunan sistem politik, negara, pemerintahan, lembaga-lembaga politik resmi dan formal. Kalau kita memakai istilah *polity*, maka kita membahas hal-hal seperti 'bagaimana peran umat Kristen dalam partai politik atau pemerintahan', 'apakah teokrasi (demokrasi, Pancasila, dsb.) adalah bentuk pemerintahan yang paling ideal', dsb.

Politics berarti kegiatan untuk memperoleh kekuasaan, pengaturan konflik kepentingan. Konsep itu juga mencakupi kegiatan politik di luar lembaga formal, seperti ceramah si cendekiawan, demo mahasiswa, penyuluhan dalam serikat buruh, kursus diurus oleh LSM, khotbah pendeta, dll.

Policy adalah kebijaksanaan, dasar pengambilan segala sesuatu keputusan dalam sebuah partai, perusahaan, sekolah, lembaga, gereja, dsb.

Politik kita seharusnya berarah pada demokrasi, jadi melibatkan atau membela seluruh anggota masyarakat dan menantang otoritarianisme (bacalah penulis-penulis Jurnal Intim lain). Ketidakterlibatan kita dalam politik (secara sadar atau tidak) juga termasuk politik. Jika kita tidak mengecam dan menantang otoritarianisme atau 'politik yang kotor', maka para penguasa bebas untuk melanjutkan pemerintahan mereka. Sikap pasif kita sebenarnya lebih kotor daripada upaya untuk menantang 'politik kotor' itu.

Mengenai otoritarianisme

Di sini kita harus menghindari pemanfaatan dikotomi otoritarianisme-demokrasi yang kaku⁵. Kenyataan lebih rumit, otoritarianisme bukan sistem pemerintahan yang dapat ditempatkan dan diidentifikasi secara gampang. Pada umumnya

kita bisa menafsirkan otoritarianisme sebagai *hubungan-hubungan kekuasaan (baik di lingkungan umum maupun pribadi), di mana pembagian kekuasaan tidak sama sekali berimbang*. Kekuasaan itu tidak pernah berkonsentrasi pada satu orang atau satu kelompok saja. Istilah ini tidak sama dengan diktator, oligarki atau tirani. Otoritarianisme tidak berarti bahwa kekuasaan dilaksanakan tanpa dukungan orang bawahan.⁶ Sejauh saya tahu kasta-kasta bawah tidak selalu merasa terpaksa untuk takluk kepada para bangsawan, perempuan tidak selalu mempersoalkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, dsb.

Selain itu ada juga orang yang menyukai demokrasi, tetapi menggunakan atau memperkuat hubungan-hubungan otoriter dalam hal yang tertentu. Kadang-kadang kepentingan diri lebih kuat daripada kepentingan demokrasi. Misalnya, jika pekerjaan dan gaji tidak lagi dijamin (pembalasan dendam para majikan), maka kita cenderung untuk mempertimbangkan kembali suara kritis kita.

Mengenai demokrasi

Demokrasi dan *civil society* adalah dua sisi mata uang. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, biasanya dengan perantara wakilnya. Apa yang perlu untuk mewujudkan demokrasi adalah partisipasi semua warga negara, partai politik yang kuat dan mandiri, pemisahan kekuasaan, pemilu yang baik dan kompetitif, toleransi terhadap organisasi non-pemerintah, dsb. Tetapi hal-hal formal itu tidak bisa diwujudkan begitu saja. Perlu banyak waktu, karena rakyat harus menuntut emansipasi dulu supaya mereka benar-benar berpartisipasi. Demokrasi yang sungguh-sungguh membutuhkan pendidikan formal dan non-formal yang memperkuat kesadaran kritis, keterampilan berorganisasi dan keterampilan melobi dan berpolitik. Dalam *civil society* yang kuat pemerintah sebenarnya takut terhadap rakyat (yaitu LSM, lembaga pendidikan, gereja, dsb.). *Civil society* mempersoalkan hubungan ketergantungan yang tidak seimbang. Bukan *bantuan karitatif* (memberi beras atau ikan kepada orang miskin, jadi aktivitas diakonia yang biasa) tetapi *pemberdayaan* (memberi lahan, pancing ikan dan pendidikan kepada orang miskin) menghancurkan hubungan ketergantungan antara orang lemah dan kuat.

Indonesia menghadapi warisan budaya Orde Baru di mana orang lemah tidak dilindungi dan orang kritis dihukum. Pada waktu yang sama Orde Baru memakai retorik indah yang menuju ke harmoni sosial, konsensus, moralitas yang tinggi, nilai religius,

dsb. Retorik itu membutuhkan banyak orang terhadap kenyataan politik: ketiadaan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) dan ketiadaan politik yang mempertanggungjawabkan (*political accountability*).⁷ Retorik itu kental. Misalnya 'konsensus' atau 'musyawarah' masih lebih populer daripada 'pemungutan suara'. Tetapi sejauh mana 'demokrasi konsensus' menyuarakan pendapat semua orang? Apakah 'musyawarah' adalah perbincangan yang sungguh-sungguh demokratis atau perbincangan dari orang-orang yang paling berkuasa?⁸

Salah satu cendekiawan, Nurcholish Madjid, berpendapat bahwa: "...di Indonesia kepentingan dan pemikiran kelas bawahan tidak diwakili dan dibela dalam urusan lokal dan nasional. Kelas bawahan seharusnya diberikan kesempatan untuk memasuki lapisan yang lebih tinggi. Kelas bawahan di Indonesia sedang diabaikan dan jika mereka tetap diabaikan, maka pasti dijadikan keributan sosial dan religius. Keributan sosial dan religius sering ditimbulkan oleh orang yang merasa *powerless* (tidak berkuasa, tidak berdaya) dan *unheard* (tak didengarkan, tidak dipedulikan). Martabat dan jati diri akan dirusakkan."⁹ Tantangan bagi kita semua adalah untuk melibatkan semua warga negara. Tidak ada satu orang yang boleh diabaikan, disingkirkan. Itu seharusnya *policy* partai-partai politik dan gereja-gereja.

Mengenai kaum cendekiawan

Nurcholish Madjid adalah salah seorang cendekiawan yang menantang otoritarianisme dan membela hak-hak kelas bawah. Mari kita menyoroti kaum cendekiawan pada umumnya. Karena kelihatannya mereka, sama dengan mahasiswa (!), cocok untuk menantang otoritarianisme. Kaum cendekiawan, yang terdiri dari wartawan, sarjana, seniman, pemimpin religius, dsb., termasuk kelas menengah. Kelas menengah entah bersifat konservatif entah progresif. Ada juga yang bersifat baik konservatif maupun progresif, tergantung pada konteks dan pertimbangan masing-masing. Di sini saya mau memanfaatkan apa yang dikemukakan oleh Ariel Heryanto mengenai kaum cendekiawan 'yang ideal'.¹⁰

Kaum cendekiawan seharusnya menjaga jarak – setidaknya-tidaknya di depan umum – terhadap kaum yang paling berkuasa secara politik dan ekonomi. Kredibilitas dan kewibawaan para cendekiawan tergantung pada kemandirian mereka, terlepas dari pencarian ganjaran materil dan non-materil. Ciri-ciri khas para cendekiawan adalah komitmen yang jelas kepada kebenaran, keadilan, etik dan keindahan.

Komitmen itu lebih kuat daripada kepentingan diri dan ganjaran materil yang duniawi. Itu berarti bahwa para cendekiawan mengabaikan status mereka yang istimewa dan tidak menyesuaikan diri kepada harapan-harapan yang berkuasa. Kerja kaum cendekiawan baru efektif kalau aktivisme mereka bersifat umum ('public intellectuals'), jadi melalui ceramah, khotbah, demo, koran, dsb. Mereka mengidentifikasi diri dengan orang bawahan ('subalterns').

Apakah kita sendiri memiliki ciri-ciri khas cendekia? Sejauh mana kita progresif dan menantang otoritarianisme? Kalau kita sebagai pendeta menguningkan gereja kita (seperti contoh ekstrem yang tadi), maka kita pasti kehilangan kredibilitas sebagai orang yang mandiri, yang menjaga jarak terhadap kaum yang paling berkuasa. Kredibilitas dan kewibawaan kita diperkuat jika kita cukup lepas dari status kita yang istimewa.

Mengenai STT Intim

Kalau kita mementingkan peranan kita dalam politik yang berarah ke demokrasi dan menantang otoritarianisme, maka kita mengkaji sejauh mana mahasiswa-mahasiswa STT-Intim dipersiapkan untuk peranan ini. Seiring dengan soal ini adalah pertanyaan apakah *sivitas akademik* kita betul-betul demokratis. Memang kita semua menyadari bahwa demokrasi di kampus kita belum diwujudkan secara optimal. Ada beberapa hambatan intern dan ekstern:

- Skeptisisme kurang. Kita membawa warisan budaya di mana *status quo* atau pikiran-pikiran lama tidak ditantang secara gampang.
- Sikap taat lebih menonjol (dihargai) daripada daya kritis.
- Kemandirian individual kurang. Struktur ketergantungan (pada dosen, pada sponsor, pada golongan sendiri, dsb.) yang kurang sehat.
- Kesemangatan untuk *bekerjasama* dengan lembaga-lembaga lain yang membela hak-hak orang bawahan belum optimal.
- Aktivitas diluar gereja sering disebut berisiko karena bisa ditafsirkan sebagai penyebaran Injil. Akibatnya tidak ada aktivitas dalam masyarakat sama sekali.
- Sistem pendidikan di Indonesia Timur kurang diperhatikan. Salah satu akibat: analisis sosial lemah.
- Warisan historis: hubungan gereja-gereja dengan pusat kekuasaan pernah kuat.

Ada juga aset dan peluang di kampus kita:

- Mahasiswa-mahasiswa: mereka pada umumnya lebih terbuka terhadap pikiran-pikiran baru, biasanya belum terlibat dalam 'permainan kepentingan'.
- BEPM: dalam badan itu mahasiswa bisa belajar demokrasi: berapat, membuat kebijaksanaan, berkompromi, melobi, membela, memprotes, dsb.
- Sekarang semua mahasiswa S1 di STT-Intim mulai studinya setelah Orde Baru: kesadaran mengenai ketidakadilan, pelanggaran HAM, dsb. semakin besar.
- Dosen-dosen dengan kesucian moral dan keberanian, yang juga merupakan 'public intellectuals'.
- Ketergantungan dasar pada Tuhan daripada 'hal-hal duniawi' seperti kekuasaan dan kekayaan.
- Alkitab sebagai sumber inspirasi yang luar biasa. (Misalnya Musa yang melepaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir, Yesus yang berpikak kepada orang lemah dan miskin.)
- Jaringan internasional yang mendorong demokrasi.
- Nilai-nilai seperti pencarian kebenaran (*truth-seeking*) dan keadilan sosial (*social justice*)¹¹ dijunjung semakin tinggi.

Ada *interaksi* antara kita sebagai individu yang berkomitmen dan konteks historis dan sosial kita. Pada umumnya aktivisme untuk mewujudkan demokrasi dan *civil society* lebih berhasil jika beberapa kondisi historis dan sosial mendorong upaya-upaya itu. Berarti *timing* historis dari aktivisme bisa tepat (si individu 'mengolah lahan subur') atau belum tepat.

Akan tetapi jika kita percaya pada apa yang dikatakan oleh si orator Wisuda tahun ini, "*Action is the Mother of Hope*" (Aksi melahirkan Harapan), maka kita tidak menunggu *timing* atau kondisi historis yang tepat, tetapi kita bergerak saja, berdasarkan keyakinan kita.

Catatan Kaki

¹ A. Nababan, *Peluang dan Tantangan Demokrasi Pancasila Pasca Reformasi*, orasi di Makassar, 16 September 2003, lihat catatan kaki 12.

² Hannah Arendt, 1977, dikutip oleh Yudi Latif, *Menjadi Warga Politik*, Kompas 12 Maret 2001

³ Machiavelli berpendapat bahwa kekuasaan politik tidak terbatas sampai tirani (abad ke-16), Hobbes berpendapat bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain, *homo homini lupus* (abad ke-17)

⁴ H. Münkler, *Theologische Realenzyklopädie, Politik/Politikologie*, 2000

⁵ Pikiran-pikiran tentang otoritarianisme yang coba saya jelaskan di sini berdasarkan buku oleh Ariel Heryanto & Sumit K. Mandal (eds.), *Challenges to authoritarianism in Indonesia and Malaysia*, 2003

⁶ *Ibid.*, hal. 2

⁷ *Ibid.*, hal. 5

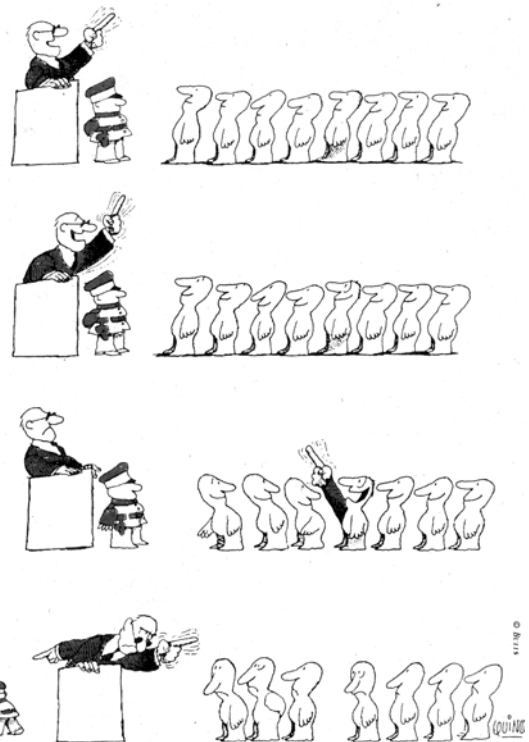
⁸ Hilde Janssen, Goddank, geen stemming, *Algemeen Dagblad*, 2 Agustus 2003

⁹ N. Madjid dibahas dalam artikel James T. Siegel, 'Kiblat' and the Mediate Jew, hal. 282, di H. de Vries & S. Weber, *Religion and Media*, 2001

¹⁰ *Challenging Authoritarianism...*, hal. 29, 30. Walaupun Heryanto menjelaskan harapan-harapan terhadap si cendekiawan, namun beliau kemudian menggambarkan bahwa si cendekiawan jarang terlepas dari kalkulasi kepentingannya: "*Intellectuals' expected and uncompromising activism did not happen regularly*".

¹¹ *Ibid.*, hal. 51

Drs. Corrie van der Ven adalah dosen STT Intim Makassar di bidang Antropologi dan Ilmu Sosial



Demokrasi atau Otoritarianisme?